

BAB I

PENDAHULUAN

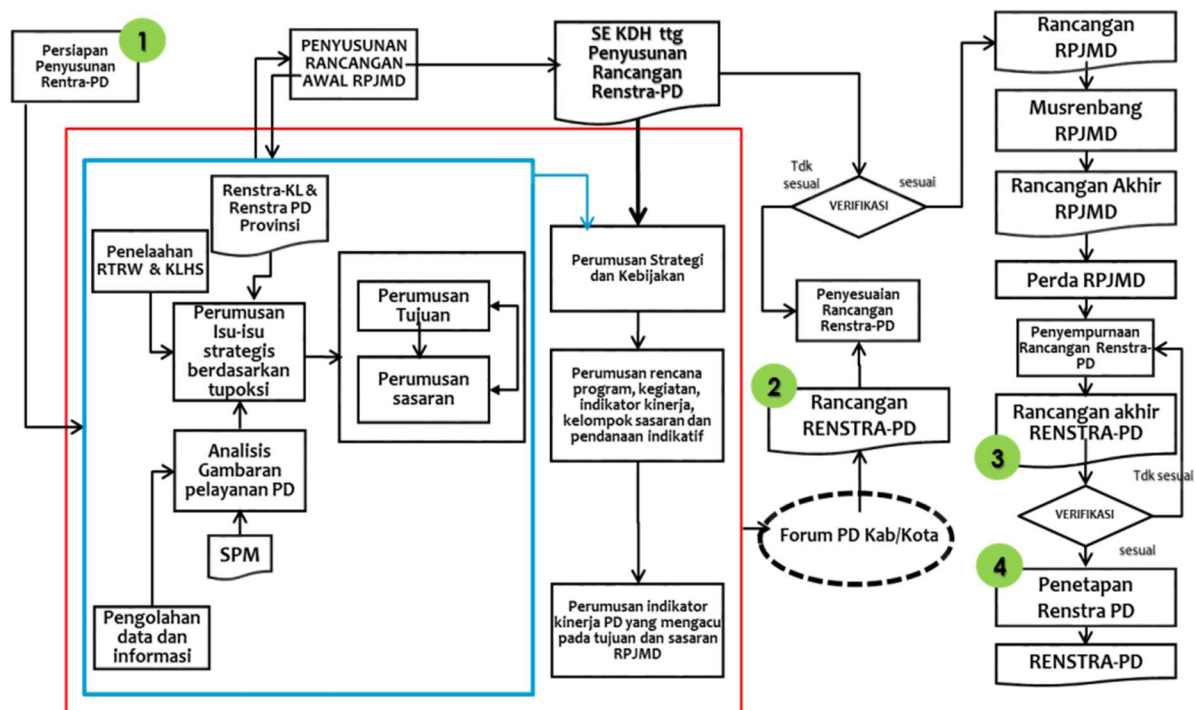
1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis Perubahan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra perubahan ini berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
 11. Surat Edaran Walikota Binjai Nomor 050-4319 perihal Penyusunan Rancangan Awal Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah gambaran rencana pelaksanaan pembangunan BPKPAD Kota Binjai selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi BPKPAD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra BPKPAD Kota Binjai tahun 2021-2026 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi BPKPAD Kota Binjai melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Renstra BPKPAD) Kota Binjai Tahun 2021-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKPAD KOTA BINJAI

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKPAD Kota Binjai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPAD KOTA BINJAI

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKPAD Kota Binjai, telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Binjai , telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Binjai Tahun 2010-2030, telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, serta penentuan isu-isu strategis BPKPAD Kota Binjai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD Kota Binjai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan BPKPAD Kota Binjai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indicator kinerja BPKPAD Kota Binjai yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan perubahan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKPAD KOTA BINJAI

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);

- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1. Aspek administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dibidang pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
- 2. Aspek Pendapatan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan eknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan;

- c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
- 3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah;
 - b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah;
 - d. Penyusunan database aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai;
 - e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

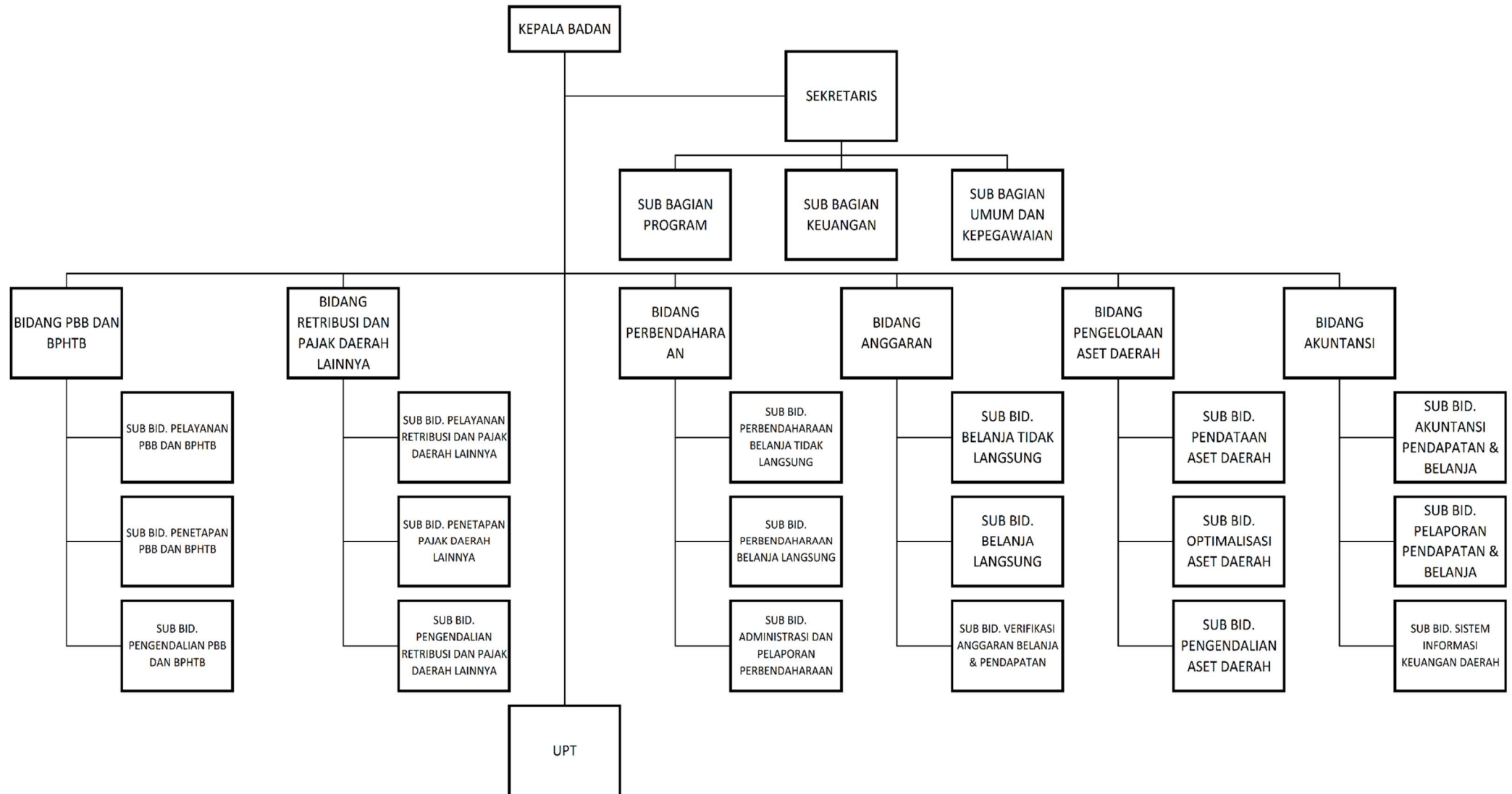
2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kependudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
- 4. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a) Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 - b) Subbidang Belanja Langsung; dan
 - c) Subbidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan.
- 5. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - b) Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja; dan
 - c) Subbidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 6. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
 - b) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - c) Subbidang Pengendalian PBB dan BPHTB.
- 7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah lainnya, terdiri dari:

- a) Subbidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
 - b) Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
- a) Subbidang Pendapatan Aset Daerah;
 - b) Subbidang Optimalisasi Aset Daerah; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai



2.2. SUMBER DAYA BPKPAD KOTA BINJAI

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKPAD Kota Binjai didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil BPKPAD Kota Binjai adalah sebanyak 116 orang. Jumlah dan komposisi pegawai BPKPAD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021

No	Struktur Jabatan/Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1.	Kepala Badan	1	PNS	S1 Ekonomi
2.	Sekretaris	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Subbag Program	1	PNS	S1 Sosial
	• Subbag Keuangan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Subbag Umum dan Kepegawaian	1	PNS	SMA
	• Staf	12	PNS	SMA/Sarjana
3	Kabid Anggaran	1	PNS	S1 Agro Bisnis
	• Kasubbid Belanja Tidak Langsung	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Belanja Langsung	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	9	PNS	SMA/Sarjana
4	Kabid Perbendaharaan	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Perbendaharaan BTL	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Perbendaharaan BL	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	13	PNS	SMA/Sarjana
5	Kabid Akuntansi	1	PNS	Magister Ilmu Pemerintahan
	• Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	1	PNS	S1 Ekonomi

	• Kasubbid Pelaporan Pendapatan dan Belanja			
	• Kasubbid Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	11	PNS	SMA/Sarjana
6	Kabid PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Hukum
	• Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pengendalian PBB dan BPHTB	1	PNS	S1 Sosial
	• Staf	17	PNS	SMA/Sarjana
7	Plt Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Penetapan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Sosial
	• Kasubbid Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	14	PNS	SMA/Sarjana
8	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	1	PNS	Magister Manajemen
	• Kasubbid Pendataan Aset Daerah	1	PNS	S1 Hukum
	• Kasubbid Optimalisasi Aset Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Kasubbid Pengendalian Aset Daerah	1	PNS	S1 Ekonomi
	• Staf	12	PNS	SMA/Sarjana
9	Pegawai Tidak Tetap	84	Non PNS	SMA/Sarjana

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Tabel 2.2.

PNS BPKPAD Kota Binjai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	87
3	Golongan II	23
4	Golongan I	-

No	Pangkat Golongan	Jumlah
	Jumlah	116

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Tabel 2.3.
PNS BPKPAD Kota Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	79
3	Akademi/D3	6
4	SLTA	26
5	SLTP	
6	SD	-
	Jumlah	116

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kota Binjai, 2021

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai memiliki sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang memiliki 2 (dua) lantai yang bertempat di Jalan Jambi Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan. Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, BPKPAD memiliki barang-barang inventaris seperti komputer, laptop, printer, lemari filling cabinet, meja, kursi, sofa, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua untuk menunjang pekerjaan maupun pelayanan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Kota Binjai.

Tabel 2.3.
SARANA dan PRASARANA BPKPAD Kota Binjai

NO		JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	1.047	5.976.532.799,69
	ALAT BESAR	2	242.092.000,00
	- electric generating set lainnya (dst)	2	242.092.000,00
	KOMPUTER	234	2.417.249.269,99

	-	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	216.035.302,00
	-	Komputer Jaringan lainnya	1	12.210.000,00
	-	P.C Unit	77	789.600.857,00
	-	Lap Top	40	383.924.615,00
	-	CPU (Peralatan Mainframe)	2	14.168.000,00
	-	Hard Disk	6	8.890.000,00
	-	Peralatan Minikomputer lainnya	2	2.460.000,00
	-	Monitor	3	9.660.750,00
	-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	555.145.585,99
	-	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	11.219.306,00
	-	External	9	15.411.162,00
	-	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	5.055.000,00
	-	Server	2	144.925.105,00
	-	Router	3	14.508.706,00
	-	Hub	3	8.959.706,00
	-	Peralatan Jaringan lainnya	6	225.075.175,00
		ALAT EKSPLORASI	1	24.900.000,00
	-	Distance Meter Electronic	1	24.900.000,00
		ALAT ANGKUTAN	19	1.497.666.950,00
	-	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	269.478.600,00
	-	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	808.035.000,00
	-	Pick Up	1	146.280.000,00
	-	Sepeda Motor	13	201.873.350,00
	-	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1	72.000.000,00
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	2.731.350,00
	-	Mesin Bor	1	1.855.175,00
	-	Mesin Gerinda	1	876.175,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	781	1.743.376.146,40
	-	Lemari Besi/Metal	36	105.920.065,00
	-	Lemari Kayu	22	125.219.730,00
	-	Rak Besi	1	455.000,00
	-	Filing Cabinet Besi	34	68.485.035,00
	-	Brandkas	3	98.900.000,00
	-	Kontainer	1	969.000,00
	-	Lemari Kaca	1	35.773.700,00
	-	CCTV - Camera Control Television System	12	18.141.228,00
	-	Papan Visual/Papan Nama	83	39.941.675,00
	-	Alat Penghancur Kertas	9	22.014.466,65
	-	Alat Pencetak Label	2	75.000.000,00
	-	Overhead Projector	1	13.750.000,00
	-	LCD Projector/Infocus	1	10.000.000,00
	-	Alat Kantor Lainnya	5	26.975.000,00
	-	Meja Kerja Kayu	43	36.670.500,00
	-	Meja Rapat	1	19.550.000,00
	-	Meja Resepsionis	1	41.273.800,00
	-	Meja 1/2 Biro	99	147.019.240,00
	-	Kursi Rapat	35	22.332.450,00
	-	Kursi Tamu	5	35.700.430,00
	-	Kursi Putar	149	113.822.370,00
	-	Kursi Biasa	5	5.032.500,00
	-	Bangku Tunggu	6	27.500.000,00
	-	Meja Komputer	8	8.517.350,00
	-	Sofa	2	35.026.060,00
	-	Lemari Es	2	5.096.350,00
	-	A.C. Window	10	52.428.259,15

	-	A.C. Split	34	155.947.280,00
	-	Kipas Angin	3	3.407.250,00
	-	Exhaust Fan	6	3.343.050,00
	-	Televisi	3	8.928.238,00
	-	Loudspeaker	5	10.060.000,00
	-	Sound System	1	10.529.750,00
	-	Microphone	1	10.870.920,60
	-	Unit Power Supply	15	116.664.025,00
	-	Camera Video	2	10.204.930,00
	-	Lambang Garuda Pancasila	1	1.639.000,00
	-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	3.490.000,00
	-	Tiang Bendera	1	28.734.500,00
	-	Tangga Aluminium	1	2.031.175,00
	-	Dispenser	4	4.661.184,00
	-	DVD Player	55	53.768.000,00
	-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	8.437.925,00
	-	Hidran Kebakaran	2	4.900.000,00
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	17.500.000,00
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	23.085.640,00
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	16.240.250,00
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14	24.963.570,00
	-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	8.245.250,00
	-	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1.960.000,00
	-	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	22.250.000,00
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5	34.235.460,30
	-	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	500.000,00
	-	Layar Film/Projector	1	9.000.000,00
	-	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	19.300.000,00
	-	Facsimile	1	5.435.460,30
		ALAT PERSENJATAAN	3	14.281.623,00
	-	Finger Print Camera	3	14.281.623,00
			1.047	5.976.532.799,69

2.3. KINERJA PELAYANAN BPKPAD KOTA BINJAI

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kota Binjai, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut;

1. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
2. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD;
3. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
4. Tersusunnya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
5. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan belanja tidak langsung PPKD sesuai dengan ketentuan;

6. Terlaksananya pengelolaan Belanja Hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan;
7. Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya;
8. Terlaksananya pendampingan penyusunan laporan keuangan PD se-Kota Binjai;
9. Kelancaran dan peningkatan kualitas jaringan SIMDA Keuangan;
10. Tersusunnya pertanggungjawaban APBD Kota Binjai;
11. Terinventarisasinya tanah milik pemerintah Kota Binjai;
12. Terlaksananya penghapusan barang-barang inventaris dan bangunan/gedung milik Pemerintah Kota Binjai;
13. Terlaksananya bimtek penilaian barang milik daerah;
14. Terlaksananya operasi sisir dan operasi pencapaian target;
15. Terlaksananya pemutkahiran data peta PBB Kota Binjai;
16. Terpeliharanya sistem IT PBB dan PAD (SIMPATDA);
17. Terlaksananya operasi penertiban pajak daerah;
18. Terdatanya potensi pajak daerah;
19. Terlaksananya TPTGR Kota Binjai

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya BPKPAD Kota Binjai, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat BPKPAD Kota Binjai selama periode 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
BPKPAD	4.258.825.414	7.962.780.818	8.418.995.018	7.899.338.540	6.805.944.080	2.846.345.021	5.180.287.541	6.403.900.384	6.295.237.249	5.792.098.776	66,83%	65,06%	76,06%	79,69%	85,10%	636.779.666,50	736.438.438,75

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPKPAD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKPAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Utama																		
1	Prosentase peningkatan pendapatan daerah				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%
2	Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%
3	Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah				104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	104,73%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%	104,73%	96,03%	110,81%	103,44%	102,88%
4	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi				630.554	922.78	1.331.095	1.548.383	1.453.781	630.554	922.78	1.331.095	1.548.383	1.453.781	630.554	922.78	#####	1.548.383	1.453.781

7	jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan				250	250	250	250	250	199	199	199	199	216	199	199	199	199	216
8	Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rasio Pendapatan BUMD dan LKM dalam Penyertaan Modal BUMD dan LKM				16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%	16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%	16,72%	37,20%	13,27%	15,22%	52,90%
10	Rasio PNS yang menguasai operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				3/8	4/7	6/9	9/9	10/10	3/8	4/7	6/9	9/9	10/10	3/8	4/7	6/9	9/9	10/10

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKPAD KOTA BINJAI

Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKPAD Kota Binjai dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi BPKPAD namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada.

Tantangan yang masih dihadapi BPKPAD Kota Binjai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah masih belum dapat dilakukan lebih intens;
5. Lokasi Aset Daerah yang sulit dijangkau dan diidentifikasi;
6. Belum Optimalnya pengakuan terhadap *reward and punishment*;
7. Belum maksimalnya dukungan jaringan online;
8. Belum optimalnya dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Disamping tantangan diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas BPKPAD Kota Binjai. Adapun beberapa **Peluang** dimaksud adalah sebagai berikut:

11. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
12. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
13. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang berbasis teknologi informasi;
14. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

16. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan;
17. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
18. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel T-B. 35**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru	Peraturan sering berubah-ubah Kemampuan memahami peraturan baru memerlukan pelatihan dan bimbingan	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah dan belum optimal	Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD	Aplikasi SIPD belum optimal
3	Produk hukum daerah tentang tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	Tarif retribusi belum diperbarui/direvisi	SKPD kurang intens merevisi Perda Retribusi
4	Belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah	Sumber pendapatan daerah masih sedikit	Sumber pendapatan daerah belum tereksplere maksimal
5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai	Masyarakat kurang memahami manfaat PBB
6	Pencairan anggaran tidak sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan di triwulan IV	Penyerapan anggaran di triwulan I – III rendah	SKPD lambat memulai pelaksanaan kegiatannya
7	Terdapatnya aset tanah yang belum bersertifikat	Proses sertifikat aset tanah terkendala	Adanya aset tanah yang tidak memiliki legalitas pendukung

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang juga telah ditetapkan sebagai Visi Kota Binjai Tahun 2021-2026 yakni **“Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumbe Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Dari ketiga Misi diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kesatu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional”**.

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Kota Binjai Tahun 2021-2026 tersebut dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai berikut:

Visi: “Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”				
No	Misi	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Pemahaman tentang Peraturan baru masih kurang	Kurangnya Diklat dan Bimtek tentang peraturan baru	Meningkatkan Anggaran Diklat dan Bimtek
		Migrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD	SIPD belum optimal	Penyempurnaan yang terus-menerus dilakukan admin SIPD Kemendagri
		Tarif retribusi belum diperbarui /direvisi	SKPD kurang intens merevisi Perda Retibusinya	Surat Edaran Kepala Daerah untuk merevisi Perda Retribusi
		Sumber pendapatan daerah masih sedikit	Sumber pendapatan daerah belum tereksplore maksimal	Penggalian potensi pendapatan daerah secara kontinyu
		Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat PBB	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishman</i> kepada pembayar PBB
		Penyerapan anggaran di triwulan I – III rendah	SKPD tidak melaksanakan kegiatannya sejak awal	Evaluasi berkala tentang progres penyerapan anggaran

			tahun	SKPD
		Terdapatnya aset tanah yang belum bersertifikat	Adanya aset tanah yang tidak memiliki legalitas pendukung	Koordinasi dengan BPN dalam proses sertifikat aset tanah

Selanjutkan disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam tabel sebagai berikut :

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius				
No	Misi	No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
		2	Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
		3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
		4	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
		5	Belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN PROVINSI

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai Perangkat Daerah Kota Binjai, dalam melaksanakan tugasnya harus mendukung sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maupun sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Renstranya, Visi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Tahun 2020-2024 adalah **Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan).

Sedangkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah: **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategisnya mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 4) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Terbatasnya alokasi anggaran guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan public melalui sisitem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (Oportunity)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
3. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik.
4. Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
5. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pendapatan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Penentuan Isu Strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dilakukan dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas belum memadai	11	20	17	12	8	20	88
2	Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	12	20	17	13	10	18	90
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	12	19	18	10	9	19	87
4	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	13	18	18	11	8	18	86
5	Belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	15	20	20	15	8	20	98

Berdasarkan Nilai Skala Kriteria, maka penentuan isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai ke depan adalah:

- 1. Belum optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
- 2. Sistem akuntabilitas melauai integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan
- 3. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas belum memadai
- 4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- 5. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel T_C.25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	80	85	90	95	100
2	Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Menurunnya persentase SILPA terhadap APBD	%	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014
3	Optimalnya pengelolaan keuangan	Meningkatnya kualitas tata kelola		Per					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
	daerah yang transparan dan akuntabel	pemerintahan	Opini BPK	ingkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Optimalnya pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	%	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
5	Optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap APBD	%	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00
			Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel TC.26 berikut:

Tabel TC.26**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI: Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
MISI 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek ASN
2. Meningkatkan Sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Mengintensifkan Diklat dan Bimtek SIPD
3. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Laporan keuangan Daerah	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Mengoptimalkan aset daerah penghasil PAD
5. Mengoptimalkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan program prioritas yang tercantum pada Perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggaran selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Selain itu, dilaksanakan pula program-program rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dijabarkan dalam tabel T-C. 27 di bawah ini :

TABEL T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BELANJA LANGSUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021-2026

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				-		38.058.943.370	100	1.226.952.647,00	100	3.810.033.190,06	100	56.880.016.051,34	100	59.786.696.175,87	100	63.250.553.238,82	100	285.054.251.303,09		
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	100	18.610.134.070	100	21.710.988.897	100	22.749.163.946	100	24.190.085.307	100	25.378.649.054	100	27.030.121.935	100	121.159.009.139		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	0	-	6	67.500.000	6	70.875.000	6	74.418.750	6	78.139.688	6	82.046.672	30	372.980.109		
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan BPKPAD	Dokumen	0	-	1	15.000.000	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.593,75	5	82.884.468,75		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50			
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	12.500.000	1	13.125.000,00	1	13.781.250,00	1	14.470.312,50	1	15.193.828,13	5	69.070.390,63			
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50			
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50			
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen laporan kinerja dan realisasi SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	5	55.256.312,50			

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Tahun	1	16.526.438.998	1	18.204.300.818	1	19.117.265.859	1	20.076.154.152	1	21.083.289.359	1	22.141.114.077	5	100.622.124.264		
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	16.224.259.798	1	17.846.685.777,80	1	18.739.020.066,69	1	19.675.971.070,02	1	20.659.769.623,53	1	21.692.758.104,70	5	98.614.204.642,74		
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terkoordinasi dan terlaksananya akuntansi SKPD	Tahun	1	252.179.200	1	302.615.040,00	1	317.745.792,00	1	333.633.081,60	1	350.314.735,68	1	367.830.472,46	5	1.672.139.121,74		
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terkoordinasi dan tersusunnya laporan keuangan SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	80.525.500,00	5	335.780.500,00		
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	0	-	2	20.000.000	2	21.000.000	2	22.050.000	2	23.152.500	2	24.310.125	10	110.512.625		
	5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan barang milik daerah SKPD	Dokumen	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.062,50	1	55.256.312,50		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen penatausaha an barang milikdaerah SKPD	Dok ume n	0	-	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	100	11.025.000,00	100	11.576.250,00	100	12.155.062,50	100	55.256.312,50	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatn ya kualitas SDM pegawai	%	0	-	15	365.000.000	30	220.000.000	45	407.000.000	60	266.200.000	75	457.820.000	75	1.716.020.000	
	5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatny a sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kegi atan	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	3	45.000.000,00	
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Terlaksanan ya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Kegi atan	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000	3	450.000.000,00	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Oran g	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai/opd yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	0	-	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	121.000.000,00	15	133.100.000,00	15	146.410.000,00	75	610.510.000,00	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Tahun	1	905.682.200	1	1.079.929.020	1	1.187.921.922	1	1.306.714.114	1	1.437.385.526	1	1.581.124.078	5	6.593.074.660	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	19.998.500	1	21.998.350,00	1	24.198.185,00	1	26.618.003,50	1	29.279.803,85	1	32.207.784,24	5	134.302.126,59	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	1	72.549.300	1	79.804.230,00	1	87.784.653,00	1	96.563.118,30	1	106.219.430,13	1	116.841.373,14	5	487.212.804,57	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor	Tahun	1	199.989.800	1	219.988.780,00	1	241.987.658,00	1	266.186.423,80	1	292.805.066,18	1	322.085.572,80	5	1.343.053.500,78	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	120.000.000	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00	1	193.261.200,00	5	805.873.200,00		
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	39.765.200	1	43.741.720,00	1	48.115.892,00	1	52.927.481,20	1	58.220.229,32	1	64.042.252,25	5	267.047.574,77		
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Tahun	1	34.986.400	1	38.485.040,00	1	42.333.544,00	1	46.566.898,40	1	51.223.588,24	1	56.345.947,06	5	234.955.017,70		
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	1	418.393.000	1	543.910.900,00	1	598.301.990,00	1	658.132.189,00	1	723.945.407,90	1	796.339.948,69	5	3.320.630.435,59		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	0	-	4	500.000.000	3	525.000.000	4	551.250.000	3	578.812.500	4	657.753.125	18	2.912.815.625		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50	
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.312,50	5	276.281.562,50	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	3	150.000.000,00	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	1	742.005.872	1	964.280.159	1	1.046.124.375	1	1.135.423.823	1	1.232.887.565	1	1.339.293.750	5	5.718.009.673	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Tahun	1	145.838.000	1	291.676.000,00	1	306.259.800,00	1	321.572.790,00	1	337.651.429,50	1	354.534.000,98	5	1.611.694.020,48	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93		
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	427.972.872	1	470.770.159,20	1	517.847.175,12	1	569.631.892,63	1	626.595.081,90	1	689.254.590,08	5	2.874.098.898,93		
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	168.195.000	12	201.834.000,00	1	222.017.400,00	1	244.219.140,00	1	268.641.054,00	1	295.505.159,40	5	1.232.216.753,40		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	436.007.000	1	509.978.900	1	560.976.790	1	617.074.469	1	678.781.916	1	746.660.107	5	3.113.472.182		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tahun	1	306.700.000	1	337.370.000,00	1	371.107.000,00	1	408.217.700,00	1	449.039.470,00	1	493.943.417,00	5	2.059.677.587,00		
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1	29.940.000	1	50.898.000,00	1	55.987.800,00	1	61.586.580,00	1	67.745.238,00	1	74.519.761,80	5	310.737.379,80		
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ terehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya	Tahun	1	49.957.000	1	59.948.400,00	1	65.943.240,00	1	72.537.564,00	1	79.791.320,40	1	87.770.452,44	5	365.990.976,84		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya / terehabilitasinya sarana dan prasarana pendukung gedung kator lainnya	Tahun	1	49.410.000	1	61.762.500,00	1	67.938.750,00	1	74.732.625,00	1	82.205.887,50	1	90.426.476,25	5	377.066.238,75		
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,0196	16.310.896.700	0,0180	22.370.796.100	0,0170	23.512.303.802	0,0160	24.713.183.678	0,0150	25.976.634.016	0,0140	27.306.035.987	0,0140	123.878.953.583		
			Opini BPK	Peringkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Tahun	1	710.921.600	1	2.496.467.680	1	2.621.291.064	1	2.752.355.617	1	2.889.973.398	1	3.034.472.068	5	13.794.559.827		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya KUA dan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terkoordinasi dan tersusunnya perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	1	86.999.900	1	91.349.895,00	1	95.917.389,75	1	100.713.259,24	1	105.748.922,20	1	111.036.368,31	5	504.765.834,50
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasi, tersusun dan terverifikasinya perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD	Peraturan	2	149.599.800	2	157.079.790,00	2	164.933.779,50	2	173.180.468,48	2	181.839.491,90	2	190.931.466,49	10	867.964.996,37
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terkoordinasi dan tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada penjabaran Perubahan APBD	Peraturan	2	387.322.000	2	406.688.100,00	2	427.022.505,00	2	448.373.630,25	2	470.792.311,76	2	494.331.927,35	10	2.247.208.474,36

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terkoordinasi dan tersusunnya regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terkoordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terkoordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terkoordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Tahun	1	149.998.300	1	1.594.997.790	1	1.674.747.680	1	1.758.485.063	1	1.846.409.317	1	1.938.729.782	5	8.813.369.632	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terkoordinasi dan terkelolanya kas daerah	Tahun	1	149.998.300	1	194.997.790,00	1	204.747.679,50	1	214.985.063,48	1	225.734.316,65	1	237.021.032,48	5	1.077.485.882,10	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersiapkan, terlaksananya pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Tahun	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50	
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00		
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran PFK	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Tahun	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	Tersusunnya petunjuk teknis administrasi keuangan	Dok ume n	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya penatausahaa n keuangan pemerintah kabupaten/kota	Tahun	0	-	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksanan ya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	100	399.996.300	100	2.359.357.930	100	2.495.293.723	100	2.639.823.095	100	2.793.555.405	100	2.957.148.445	100	13.245.178.598

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terkoordinasinya pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terkonsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan pemerintah daerah	Kegiatan	1	199.996.300	1	219.995.930,00	1	241.995.523,00	1	266.195.075,30	1	292.814.582,83	1	322.096.041,11	5	1.343.097.152,24		
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban APBD dan rancangan penjabaran pertanggungjawaban APBD	Peraturan	0	-	2	300.000.000,00	2	315.000.000,00	2	330.750.000,00	2	347.287.500,00	2	364.651.875,00	10	1.657.689.375,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00	
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00	
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	1	1.657.689.375,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Kegiatan	1	200.000.000	1	139.362.000,00	1	153.298.200,00	1	168.628.020,00	1	185.490.822,00	1	204.039.904,20	1	850.818.946,20	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	15.000.000.000	100	15.850.000.000	100	16.647.500.000	100	17.485.375.000	100	18.365.693.750	100	19.290.633.438	100	87.639.202.188	
	5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya kebijakan dan alokasi subsidi	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya dana darurat dan mendesak	Kegiatan	1	15.000.000.000	1	15.750.000.000,00	1	16.537.500.000,00	1	17.364.375.000,00	1	18.232.593.750,00	1	19.144.223.437,50	1	87.028.692.187,50	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya dana bagi hasil kabupaten/kota	Kegiatan	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	305.255.000,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terkelolanya data dan terimplementasinya sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	%	100	49.980.500	100	69.972.700	100	73.471.335	100	77.144.902	100	81.002.147	100	85.052.254	100	386.643.338		
	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah	Tahun	1	49.980.500	1	69.972.700,00	1	73.471.335,00	1	77.144.901,75	1	81.002.146,84	1	85.052.254,18	1	386.643.337,77		
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%	3,30	640.000.000	3,50	1.320.000.000	3,75	1.386.000.000	4,00	1.455.300.000	4,25	1.528.065.000	4,50	1.604.468.250	4,50	7.293.833.250		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya barang milik daerah	%	100	640.000.000	100	1.320.000.000	100	1.386.000.000	100	1.455.300.000	100	1.528.065.000	100	1.604.468.250	100	7.293.833.250		
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Buku	1	400.000.000	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	1	510.512.625,00	5	2.320.765.125,00		
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	Kegiatan	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	Kegiatan	1	40.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50		
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Tahun	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00		
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Tahun	1	50.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	5	828.844.687,50		
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Dokumen	0	-	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	1	552.563.125,00	
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya pengelolaan barang milik daerah	Kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	1	173.643.750,00	1	182.325.937,50	1	828.844.687,50	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,90	2.497.912.600	19,00	5.825.167.650	19,25	6.162.565.443	19,50	6.521.447.066	19,75	6.903.348.106	20,00	7.309.927.066	20,00	32.722.455.331	
			Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		7,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan	7	2.497.912.600	14	5.825.167.650	14	6.162.565.443	14	6.521.447.066	14	6.903.348.106	14	7.309.927.066	70	32.722.455.331	
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	231.525.000,00	1	243.101.250,00	5	1.105.126.250,00	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	1	299.999.900	1	464.999.845,00	1	488.249.837,25	1	512.662.329,11	1	538.295.445,57	1	565.210.217,85	5	2.569.417.674,78		
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	5	610.510.000,00		
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kegiatan	1	599.959.700	1	899.939.550,00	1	944.936.527,50	1	992.183.353,88	1	1.041.792.521,57	1	1.093.882.147,65	5	4.972.734.100,59		
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Kegiatan	1	149.999.800	1	164.999.780,00	1	181.499.758,00	1	199.649.733,80	1	219.614.707,18	1	241.576.177,90	5	1.007.340.156,88		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kegiatan	1	73.010.000	1	80.311.000,00	1	88.342.100,00	1	97.176.310,00	1	106.893.941,00	1	117.583.335,10	5	490.306.686,10		
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian PBBP2 serta BPHTB	Kegiatan	1	299.996.500	1	1.049.987.750,00	1	1.102.487.137,50	1	1.157.611.494,38	1	1.215.492.069,09	1	1.276.266.672,55	5	5.801.845.123,52		
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50		
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	250.000.000,00	1	262.500.000,00	1	275.625.000,00	1	289.406.250,00	1	303.876.562,50	5	1.381.407.812,50		

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	400.000.000,00	1	420.000.000,00	1	441.000.000,00	1	463.050.000,00	1	486.202.500,00	5	2.210.252.500,00	
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah	Kegiatan	0	-	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.750.000,00	1	347.287.500,00	1	364.651.875,00	5	1.657.689.375,00	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Kegiatan	1	524.968.200	1	787.452.300,00	1	826.824.915,00	1	868.166.160,75	1	911.574.468,79	1	957.153.192,23	5	4.351.171.036,76	

Tujuan / Sasaran	Kode (Prog.)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026	
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksanan ya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kegiatan	1	549.978.500	1	577.477.425,00	1	635.225.167,50	1	698.747.684,25	1	768.622.452,68	1	845.484.697,94	5	3.525.557.427,37

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 28 berikut ini:

Tabel TC.28
Indikator Kinerja BPKPAD Kota Binjai Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun – 1 (2022)	Tahun – 2 (2023)	Tahun – 3 (2024)	Tahun – 4 (2025)	Tahun – 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	-	100	100	100	100	100	100
Persentase SILPA terhadap APBD	-	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014	0,014

Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	-	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,50
Persentase PAD terhadap APBD	-	19,00	19,25	19,50	19,75	20,00	20,00
Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	-	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi 5 tahun-an dalam rangka mengoperasionalkan Perubahan RPJMD Kota Binjai yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan tata kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapata dan asset daerah.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada output dan outcome yang ditargetkan guna mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan Pengelolaa Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI**

**AFFAN SIREGAR, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001**